

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Purworejo dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, studi kasus pada BPPKAD Kabupaten Purworejo. Dengan mengetahui perubahan kebijakan tersebut maka dapat diberikan masukan kepada instansi terkait agar penerimaan PDRD dapat optimal. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara di Kabupaten Purworejo serta studi pustaka terkait dengan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan penelitian terdahulu tentang Pajak Daerah. Analisis data menggunakan *interactive* model. Hasil dari penelitian ini, dengan diberlakukannya UU Cipta kerja terdapat perubahan atas Peraturan Daerah yakni, terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Pelayanan Pasar. Perubahan atas Perda tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap penerimaan PDRD di Kabupaten Purworejo. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PDRD di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atas pembaharuan aturan, menambah objek pajak dan retribusi daerah serta dapat dilakukan dengan penambahan alat untuk pembayaran *e-retribusi* di setiap titik lokasi yang potensial.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

ABSTRACT

The aims of this study is to analyze and identify the policy of Regional Taxes and Regional Retribution (PDRD) in Kabupaten Purworejo with the implementation of UU Cipta Kerja, a case study on BPPKAD Kabupaten Purworejo. By knowing the changing of regional taxes and retribution's policy, can give suggestion to institution so the revenue of PDRD can be optimal. This research was conducted by observations, interviews in BPPKAD Kabupaten Purworejo and literature studies related to regional taxes and retributions and previous research on regional taxes and retributions. Data analysis using interactive model. The results of this study, with the enactment of UU Cipta Kerja, there are changes on Regional Regulations (Perda), those related to Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga, and Retribusi Pelayanan Pasar. The amendment of Perda has a potency to make positive impact on revenue of PDRD in Kabupaten Purworejo. Efforts to optimize PDRD revenue in Kabupaten Purworejo can be done by socializing the renewal of rules, adding objects of regional taxes and levies and can be done by adding tools for payment of e-retribusi at each potential location.

Keywords : UU Cipta Kerja, Potency of PDRD, Kabupaten Purworejo's Regional Government.